

Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau



AFC, siap uji
14/12/2022
[Signature]

Oleh:

HENDRAWAN

18313371

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat
Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Hendrawan
Nomor Mahasiswa : 18313371
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Penulis



Hendrawan

PENGESAHAN

Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau

Nama : Hendrawan
Nomor Mahasiswa : 18313371
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D

NIP: 933130105

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau

Disusun oleh : HENDRAWAN

Nomor Mahasiswa 18313371

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Jum'at, 13 Januari 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.

Penguji : Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.,M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA
Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S Al-Insyirah: 5)

“Allah SWT Bersama Orang-orang yang Sabar” (Q.S Al-Baqarah: 153)

“Segala hal yang dimulai dengan Bismillah, akan ditutup dengan Alhamdulillah”

Alhamdulillahirabbal’alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan berkah yang tak henti-hentinya berupa kesehatan, kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau” sebagai salah satu prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, dan mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis, alm. Bapak Mispan dan Ibu Rodiah yang sangat penulis sayangi dan cintai, terima kasih tak terhingga atas segala motivasi, dukungan, nasehat, serta do’a dan kasih sayang yang telah bapak ibu berikan kepada penulis.
2. Saudara saudari penulis yang tercinta Hendrianto, Taufik, Seri Ayu, Reski dan Bagas Kurniawan atas dukungan, semangat dan do’a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Adik tercinta Andhia Putri Pratami dan sahabat-sahabat penulis gaby putri ardynasari dan ilham bagus yudha prasetya yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan menghibur penulis selama penyusunan skripsi
4. Semua sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat serta senantiasa membantu dan membersamai penulis selama menempuh studi di Yogyakarta terkhusus untuk Syahtriagum Syahrir, Wanda Anggya Murda, Salsabila Tiaratama H.W.,
5. Sahabat tim futsal Mahesa yang berada di Yogyakarta bersama penulis Boy Sandi, dan Faldo

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau”

Salam dan Salawat selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberi teladan baik, sebagai sumber inspirasi penulis dan seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, meliputi:

1. Allah SWT Yang Maha Pembuka Rahmat dan Maha Penolong
2. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Mispan dan Ibu Rodiah yang sangat penulis sayangi dan cintai, terima kasih tak terhingga atas segala motivasi, dukungan, nasehat, serta do'a dan kasih sayang yang telah bapak ibu berikan kepada penulis.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Abdul Hakim, selaku Kaprodi Ilmu Ekonomi dan seluruh jajaran pengurus Prodi Ilmu ekonomi serta selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Terimakasih banyak
6. Saudara saudari penulis yang tercinta Hendrianto, Taufik, Seri Ayu, Reski dan Bagas Kurniawan atas dukungan, semangat dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Adik tercinta Andhia Putri Pratami yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, inspirasi, dan menghibur penulis selama penyusunan skripsi serta membersamai penulis selama menempuh studi di Yogyakarta.
8. Sahabat Pecinta Citato, gaby putri ardynasari dan ilham bagus yudha prasetya yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan menghibur penulis selama

penyusunan skripsi serta senantiasa membantu dan kebersamai penulis selama menempuh studi di Yogyakarta.

9. Sahabat Katakita, Syahtriagum Syahrir, Wanda Anggya Murda, Salsabilla Tiaratama H.W., Adim Windi Yad'ulah serta Rizal Awaludin yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi serta senantiasa membantu dan kebersamai penulis selama menempuh studi di Yogyakarta.
10. Sahabat penulis sesama kota asal yaitu kota Duri. Ajim, Martin, dan Nurul Prastivi yang senantiasa membantu, dan memberikan semangat serta kebersamai penulis selama menempuh studi di kota istimewa Yogyakarta.
11. Keluarga besar MIJ DIY (Mandau In Jogja) dan HMJIE FBE UII (Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi), organisasi dan komunitas tempat penulis berproses dan belajar tak terhingga selama menempuh studi di kota istimewa Yogyakarta.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Apabila terdapat kesalahan materi di dalam skripsi ini, penulis mengucapkan mohon maaf. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	III
PENGESAHAN.....	IV
MOTTO.....	V
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR GAMBAR	X
ABSTRAK	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN.....	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	12
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	12
2.2 LANDASAN TEORI	17
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	17
2.2.2 Upah Minimum.....	18
2.2.3 Kemiskinan.....	20
2.2.4 Pengangguran	21
2.3 KERANGKA PENELITIAN	23
2.4 HIPOTESIS PENELITIAN.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 JENIS DAN SUMBER DATA	24
3.2 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	24
3.3 METODE ANALISIS	25
3.4 PENDEKATAN MODEL REGRESI DATA PANEL	26
3.5 PEMILIHAN MODEL REGRESI DATA PANEL.....	28
3.6 PENGUJIAN ASUMSI KLASIK.....	30
3.7 PENGUJIAN HIPOTESIS	31
3.8 ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI (R^2).....	33
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	35
4.1 DESKRIPSI DATA.....	35
4.2 ANALISIS DESKRIPTIF.....	35
4.3 HASIL ANALISIS PENELITIAN.....	37
4.3.1 Pemilihan model yang tepat.....	37
4.3.2 Uji statistik dengan model fixed effect.....	39
4.3.3 Pengujian Asumsi Klasik.....	39
4.3.4 Pengujian Hipotesis	41
4.3.5 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	43
4.4 PEMBAHASAN	43
4.4.2 Jumlah Penduduk Miskin dan indeks pembangunan manusia di Riau.....	44
4.4.3 Tingkat Pengangguran dan indeks pembangunan manusia di Riau	45

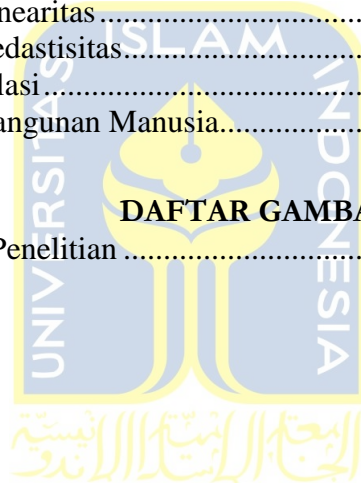
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 KESIMPULAN	49
5.2 SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA,	50
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	2
Tabel 1.2 Data Penduduk Miskin.....	4
Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi.....	6
Tabel 1.4 Upah Minimum Tahun 2018 - 2020	8
Tabel 4.1 Tabel Data Statistik.....	35
Tabel 4.2 Uji Chow	37
Tabel 4.3 Uji Hausman	38
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	39
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas.....	40
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi.....	40
Tabel 4.7 Indeks Pembangunan Manusia.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	23
--------------------------------------	----



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau pada tahun 2011-2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, Ditnakertrans Riau, BPS Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau serta Bappenas. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode analisis data panel yang menggabungkan *cross section* 12 kabupaten atau kota serta *time series* 11 tahun dari periode 2011 hingga 2021. Berdasarkan uji data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect* menunjukkan hasil bahwa secara simultan, semua variabel independen yaitu Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Riau pada tahun 2011-2021, Kemudian secara parsial, Upah minimum berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan manusia, kemudian Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh Signifikan dan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia serta Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Indeks pembangunan Manusia di Riau pada tahun 2011-2021

Keywords: Upah Minimum, Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting pembangunan ekonomi nasional, kelangsungan hidup masyarakat, Penyedia lapangan kerja bagi masyarakat, penyediaan pangan dalam negeri serta penyumbang terhadap PDB Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator yang penting untuk melihat situasi perekonomian suatu negara. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Produk Domestik Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Namun indikator pertumbuhan secara PDB ini belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada suatu negara karena adanya unit-unit kecil yang terabaikan. Menurut Smith (2003), keberhasilan suatu pembangunan ekonomi pada sebuah negara dilihat tiga aspek pokok yaitu (1) Ketika daya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya berkembang (sustenance), (2) harga diri masyarakat yang meningkat (self-esteem), (3) kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan hak asasi manusia meningkat. Untuk itu terdapat indikator untuk melihat suatu kondisi individu dalam perkembangan dan pembangunan secara berkala yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang digunakan dalam mengukur capaian dasar pembangunan manusia pada suatu negara, yaitu (1) Umur panjang dan hidup sehat (2) pendidikan dan pengetahuan (3) Standar hidup yang layak. Pada IPM metode terbaru aspek umur panjang dan hidup sehat diukur melalui umur harapan hidup saat lahir, kemudian Pendidikan diukur melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta standar hidup layak diukur melalui Produk Nasional Bruto (PNB) (BPS, 2022).

Berdasarkan data dari BPS (2020), capaian Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di tahun 2020 adalah 71,94 yang termasuk dalam kategori tinggi, dan

berada pada peringkat ke-111 di dunia dan ke lima di ASEAN. Sedangkan jika melihat pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan indikator pendapatan perkapita, menurut data dari United Nation, pendapatan perkapita Indonesia adalah 4,136 Dolar AS yang berada pada urutan ke-115 dan ada urutan ke lima di ASEAN.

Berdasarkan data dari Bappenas didapatkan data bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2018 - 2021. data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 tentang Indeks Pembangunan Manusia berikut ini:

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi			
	2018	2019	2020	2021
Aceh	71.19	71.90	71.99	72.18
Sumatera Utara	71.18	71.74	71.77	72
Sumatera Barat	71.73	72.39	72.38	72.65
Riau	72.44	73	72.71	72.94
Jambi	70.65	71.26	71.29	71.63
Sumatera Selatan	69.39	70.02	70.01	70.24
Bengkulu	70.64	71.21	71.40	71.64
Lampung	69.02	69.57	69.69	69.90
Kep. Bangka Belitung	70.67	71.30	71.47	71.69
Kep. Riau	74.84	75.48	75.59	75.79
Dki Jakarta	80.47	80.76	80.77	81.11
Jawa Barat	71.30	72.03	72.09	72.45
Jawa Tengah	71.12	71.73	71.87	72.16
Di Yogyakarta	79.53	79.99	79.97	80.22
Jawa Timur	70.77	71.50	71.71	72.14
Banten	71.95	72.44	72.45	72.72
Bali	74.77	75.38	75.50	75.69
Nusa Tenggara Barat	67.30	68.14	68.25	68.65
Nusa Tenggara Timur	64.39	65.23	65.19	65.28
Kalimantan Barat	66.98	67.65	67.66	67.90

Kalimantan Tengah	70.42	70.91	71.05	71.25
Kalimantan Selatan	70.17	70.72	70.91	71.28
Kalimantan Timur	75.83	76.61	76.24	76.88
Kalimantan Utara	70.56	71.15	70.63	71.19
Sulawesi Utara	72.20	72.99	72.93	73.30
Sulawesi Tengah	68.88	69.50	69.55	69.79
Sulawesi Selatan	70.90	71.66	71.93	72.24
Sulawesi Tenggara	70.61	71.20	71.45	71.66
Gorontalo	67.71	68.49	68.68	69
Sulawesi Barat	65.10	65.73	66.11	66.36
Maluku	68.87	69.45	69.49	69.71
Maluku Utara	67.76	68.70	68.49	68.76
Papua Barat	63.74	64.70	65.09	65.26
Papua	60.06	60.84	60.44	60.62
Indonesia	71.39	71.92	71.94	72.29

Sumber: Bappenas

Berdasarkan dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan dan penurunan IPM Provinsi Riau. Pada tahun 2018 diketahui bahwa IPM Provinsi Riau adalah sebesar 72.44. Pada tahun 2019 IPM Provinsi Riau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 73.00. Pada tahun 2020 IPM Provinsi Riau mengalami penurunan menjadi 72.91 yang disebabkan pandemic Covid-19 dan pada tahun 2021 berhasil mengalami kenaikan IPM menjadi 72.94.

Proses pembangunan ekonomi pada suatu wilayah ditentukan melalui kualitas manusia yang berada disuatu wilayah tersebut. IPM adalah sebuah indikator sebagai pengukur kualitas manusia pada hasil pembangunan ekonomi disuatu daerah, berupa **indeks** perkembangan pembangunan manusia. IPM memiliki aspek pokok yaitu tentang pendidikan atau pengetahuan, kesehatan, serta standar hidup yang layak atau ekonominya. Terdapat unsur pokok yang digunakan Indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai dasar-dasar pembangunan manusia dalam mengukur capaian suatu wilayah yaitu dimensi kesehatan, pendidikan serta tingkat hidup yang layak (UNDP, 1990).

Dimensi kesehatan mencakup indikator angka harapan hidup suatu kelahiran (life expectation at birth), dimensi kedua tingkat pendidikan atau pengetahuan berdasarkan indikator rasio perkiraan lama tahun sekolah (expected years schooling) dan dimensi terakhir tentang standar kehidupan layak yang diukur berdasarkan pendapatan per-kapita dengan standar US\$ (UNDP, 2010)

Ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan IPM. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan, kesejahteraan dan keadilan yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan - kebijakan pemerintah.

Di dalam suatu wilayah terdapat suatu permasalahan ekonomi yang mengakibatkan pembangunan manusia berjalan tidak semestinya dan berkelanjutan ke variabel lainnya seperti kemiskinan dan pengangguran.

Kemiskinan merupakan masalah yang memberikan efek serius dalam suatu negara dan sangat sulit diatasi. kemiskinan ini berawal dari ketidakmampuan masyarakat untuk membeli dan memenuhi suatu kebutuhan pokok hidupnya. Masalah ini menjadi sangat kompleks ketika suatu komponen lainnya tidak bisa dipenuhi masyarakat miskin seperti kesehatan, pendidikan dan pengetahuan, kehidupan sosial dan budaya yang baik dan bermoral.

hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan perekonomian di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga target pembangunan manusia yang ingin dicapai oleh pemerintah sulit direalisasikan dengan lancar.

Adapun Data penduduk miskin dari tahun 2015-2021 di Riau dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Data Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi							
Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	17.11	16.43	15.92	15.68	15.01	15.43	15.53
Sumatera Utara	10.79	10.27	9.28	8.94	8.63	9.14	8.49
Sumatera Barat	6.71	7.14	6.75	6.55	6.29	6.56	6.04
Riau	8.82	7.67	7.41	7.21	6.90	7.04	7.00

Jambi	9.12	8.37	7.90	7.85	7.51	7.97	7.67
Sumatera Selatan	13.77	13.39	13.10	12.82	12.56	12.98	12.79
Bengkulu	17.16	17.03	15.59	15.41	14.91	15.30	14.43
Lampung	13.53	13.86	13.04	13.01	12.30	12.76	11.67
Kep. Bangka Belitung	4.83	5.04	5.30	4.77	4.50	4.89	4.67
Kep. Riau	5.78	5.84	6.13	5.83	5.80	6.13	5.75
Dki Jakarta	3.61	3.75	3.78	3.55	3.42	4.69	4.67
Jawa Barat	9.57	8.77	7.83	7.25	6.82	8.43	7.97
Jawa Tengah	13.32	13.19	12.23	11.19	10.58	11.84	11.25
Di Yogyakarta	13.16	13.10	12.36	11.81	11.44	12.80	11.91
Jawa Timur	12.28	11.85	11.20	10.85	10.20	11.46	10.59
Banten	5.75	5.36	5.59	5.25	4.94	6.63	6.50
Bali	5.25	4.15	4.14	3.91	3.61	4.45	4.72
Nusa Tenggara Barat	16.54	16.02	15.05	14.63	13.88	14.23	13.83
Nusa Tenggara Timur	22.58	22.01	21.38	21.03	20.62	21.21	20.44
Kalimantan Barat	8.44	8.00	7.86	7.37	7.28	7.24	6.84
Kalimantan Tengah	5.91	5.36	5.26	5.10	4.81	5.26	5.16
Kalimantan Selatan	4.72	4.52	4.70	4.65	4.47	4.83	4.56
Kalimantan Timur	6.10	6.00	6.08	6.06	5.91	6.64	6.27
Kalimantan Utara	6.32	6.99	6.96	6.86	6.49	7.41	6.83
Sulawesi Utara	8.98	8.20	7.90	7.59	7.51	7.78	7.36
Sulawesi Tengah	14.07	14.09	14.22	13.69	13.18	13.06	12.18
Sulawesi Selatan	10.12	9.24	9.48	8.87	8.56	8.99	8.53
Sulawesi Tenggara	13.74	12.77	11.97	11.32	11.04	11.69	11.74
Gorontalo	18.16	17.63	17.14	15.83	15.31	15.59	15.41
Sulawesi Barat	11.90	11.19	11.18	11.22	10.95	11.50	11.85
Maluku	19.36	19.26	18.29	17.85	17.65	17.99	16.30
Maluku Utara	6.22	6.41	6.44	6.62	6.91	6.97	6.38
Papua Barat	25.73	24.88	23.12	22.66	21.51	21.70	21.82
Papua	28.40	28.40	27.76	27.43	26.55	26.80	27.38

Sumber: Bappenas

Berdasarkan data Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Persentase kemiskinan penduduk dari tahun 2015-2019 di Riau selalu menurun, artinya program pemerintah memperbaiki taraf hidup masyarakat meningkat kecuali pada tahun 2020-2021 yang diakibatkan adanya pandemic covid.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Angkatan kerja yang tidak bekerja, belum memiliki atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang belum atau tidak memiliki maupun sedang mencari pekerjaan (Sukirno, 2004).

Tingkat pengangguran menjadi komponen yang dapat mempengaruhi Pembangunan Manusia. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bertambahnya para tenaga kerja setiap tahunnya mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang menganggur sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ketika para penganggur tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka aspek ini akan menjadi masalah pemerintah untuk diatasi. Lapangan pekerjaan yang terbatas mengakibatkan para tenaga kerja harus mengikuti seleksi dalam mendapatkan pekerjaan, tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang rendah cenderung tidak mendapat pekerjaan atau jika mendapat pekerjaan hanya sebagai pekerja paling bawah yang gajinya belum tentu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu aspek pendidikan dan pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan kelayakan hidup dan juga menjadi faktor dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan data dari website www.bps.go.id didapatkan data Tingkat Pengangguran Terbuka di Riau 2015 – 2021. Adapun data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen) per Agustus							
Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	9.93	7.57	6.57	6.34	6.17	6.59	6.30
Sumatera Utara	6.71	5.84	5.60	5.55	5.39	6.91	6.33
Sumatera Barat	6.89	5.09	5.58	5.66	5.38	6.88	6.52

Riau	7.83	7.43	6.22	5.98	5.76	6.32	4.42
Jambi	4.34	4.00	3.87	3.73	4.06	5.13	5.09
Sumatera Selatan	6.07	4.31	4.39	4.27	4.53	5.51	4.98
Bengkulu	4.91	3.30	3.74	3.35	3.26	4.07	3.65
Lampung	5.14	4.62	4.33	4.04	4.03	4.67	4.69
Kep. Bangka Belitung	6.29	2.60	3.78	3.61	3.58	5.25	5.03
Kep. Riau	6.20	7.69	7.16	8.04	7.50	10.34	9.91
Dki Jakarta	7.23	6.12	7.14	6.65	6.54	10.95	8.50
Jawa Barat	8.72	8.89	8.22	8.23	8.04	10.46	9.82
Jawa Tengah	4.99	4.63	4.57	4.47	4.44	6.48	5.95
Di Yogyakarta	4.07	2.72	3.02	3.37	3.18	4.57	4.56
Jawa Timur	4.47	4.21	4.00	3.91	3.82	5.84	5.74
Banten	9.55	8.92	9.28	8.47	8.11	10.64	8.98
Bali	1.99	1.89	1.48	1.40	1.57	5.63	5.37
Nusa Tenggara Barat	5.69	3.94	3.32	3.58	3.28	4.22	3.01
Nusa Tenggara Timur	3.83	3.25	3.27	2.85	3.14	4.28	3.77
Kalimantan Barat	5.15	4.23	4.36	4.18	4.35	5.81	5.82
Kalimantan Tengah	4.54	4.82	4.23	3.91	4.04	4.58	4.53
Kalimantan Selatan	4.92	5.45	4.77	4.35	4.18	4.74	4.95
Kalimantan Timur	7.50	7.95	6.91	6.41	5.94	6.87	6.83
Kalimantan Utara	5.68	5.23	5.54	5.11	4.49	4.97	4.58
Sulawesi Utara	9.03	6.18	7.18	6.61	6.01	7.37	7.06
Sulawesi Tengah	4.10	3.29	3.81	3.37	3.11	3.77	3.75
Sulawesi Selatan	5.95	4.80	5.61	4.94	4.62	6.31	5.72
Sulawesi Tenggara	5.55	2.72	3.30	3.19	3.52	4.58	3.92
Gorontalo	4.65	2.76	4.28	3.70	3.76	4.28	3.01
Sulawesi Barat	3.35	3.33	3.21	3.01	2.98	3.32	3.13
Maluku	9.93	7.05	9.29	6.95	6.69	7.57	6.93
Maluku Utara	6.05	4.01	5.33	4.63	4.81	5.15	4.71
Papua Barat	8.08	7.46	6.49	6.45	6.43	6.80	5.84

Papua	3.99	3.35	3.62	3.00	3.51	4.28	3.33
-------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat pengangguran terbuka di Riau selalu mengalami penurunan dari 2015 hingga 2021 artinya tenaga kerja di Riau mulai mendapatkan pekerjaan dan daya beli meningkat kecuali ditahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi covid.

Upah Minimum dapat menjadi indikator untuk mengurangi tingkat pengangguran. Dengan Upah Minimum yang begitu rendah maka penduduk pada suatu wilayah memiliki tingkat konsumsi serta taraf standar hidup yang rendah pula, sedangkan kehidupan penduduk kota dengan Upah Minimum yang tinggi maka penduduk di kota akan memiliki tingkat konsumsi dan standar hidup yang lebih tinggi. Upah minimum provinsi di Indonesia dari tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Upah Minimum Tahun 2018 - 2020

Provinsi	Upah Minimum Regional/Provinsi (Rupiah)		
	2018	2019	2020
Aceh	2700000.00	2916810.00	3165031.00
Sumatera Utara	2132189.00	2303403.00	2499423.00
Sumatera Barat	2119067.00	2289220.00	2484041.00
Riau	2464154.00	2662026.00	2888564.00
Jambi	2243719.00	2423889.00	2630162.00
Sumatera Selatan	2595995.00	2804453.00	3043111.00
Bengkulu	1888741.00	2040407.00	2213604.00
Lampung	2074673.00	2241270.00	2432002.00
Kep. Bangka Belitung	2755444.00	2976706.00	3230024.00
Kep. Riau	2563875.00	2769754.00	3005460.00
Dki Jakarta	3648036.00	3940973.00	4276350.00
Jawa Barat	1544361.00	1668373.00	1810351.00
Jawa Tengah	1486065.00	1605396.00	1742015.00
Di Yogyakarta	1454154.00	1570923.00	1704608.00
Jawa Timur	1508895.00	1630059.00	1768777.00

Banten	2099385.00	2267990.00	2460997.00
Bali	2127157.00	2297969.00	2494000.00
Nusa Tenggara Barat	1825000.00	2012610.00	2183883.00
Nusa Tenggara Timur	1660000.00	1795000.00	1950000.00
Kalimantan Barat	2046900.00	2211500.00	2399699.00
Kalimantan Tengah	2421305.00	2663435.00	2903145.00
Kalimantan Selatan	2454671.00	2651782.00	2877449.00
Kalimantan Timur	2543332.00	2747561.00	2981379.00
Kalimantan Utara	2559903.00	2765463.00	3000804.00
Sulawesi Utara	2824286.00	3051076.00	3310723.00
Sulawesi Tengah	1965232.00	2123040.00	2303711.00
Sulawesi Selatan	2647767.00	2860382.00	3103800.00
Sulawesi Tenggara	2177052.00	2351870.00	2552015.00
Gorontalo	2206813.00	2384020.00	2788826.00
Sulawesi Barat	2193530.00	2381000.00	2678863.00
Maluku	2222220.00	2400664.00	2604961.00
Maluku Utara	2320803.00	2508091.00	2721530.00
Papua Barat	2667000.00	2934500.00	3134600.00
Papua	3000000.00	3240900.00	3516700.00
Indonesia	2268874.00	2455662.00	2672371.00

Sumber: BPS, 2022

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa upah minimum di Riau pada tahun 2020 sebesar 2,8 jt yang selalu meningkat dari tahun 2018 dan 2019. Upah minimum yang selalu meningkat akan menyebabkan daya beli juga meningkat, daya beli yang meningkat artinya semakin tinggi kesempatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Riau merupakan salah satu daerah terkaya di Indonesia, dimana daerah ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, emas, karet, kelapa sawit dan perkebunan lainnya. Riau memiliki luas area daratan 89.150,15 Km² dan luas lautan 18.782,56 Km².

Pencapaian Riau sebagai perekonomian terbesar ke-enam di Indonesia tahun 2020 ini tidak terlepas dari besarnya peran sektor perkebunan atau

pertanian, pertambangan minyak bumi dan gas. Komoditas-komoditas terbesar ini memiliki andil besar dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, produk domestik bruto, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki perekonomian terbesar di Indonesia, Riau sangat menarik sebagai objek untuk diteliti mengenai kondisi pembangunan manusia dan beberapa permasalahan ekonomi di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau tahun 2011-2021”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2021?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2021?
- 1.2.3 Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2021.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2021.
- 1.3.3 Bagaimana mengetahui pengaruh pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar kajian serta referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang ataupun dasar dalam orientasi pengembangan studi pembelajaran khususnya ekonomi

dan menjadi nilai tambah dalam ilmu pengetahuan ilmiah dibidang pendidikan Indonesia serta memberikan wawasan luas tentang informasi terkait yaitu ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu, Informasi dan wawasan umum ataupun materi sesuai pembelajaran bagi penulis, serta penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan tugas akhir bagi penulis.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah provinsi Riau dan semua provinsi sebagai bahan pertimbangan ketika melakukan kebijakan dan perencanaan terkait kebijakan-kebijakan ekonomi.

1.4.2.3 Bagi peneliti lainnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan referensi ataupun bahan pustaka, serta sebagai rujukan untuk penelitian sesuai tema yang berkaitan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Nursiah dan Yusbar, (2014) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten atau Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. Penelitian menggunakan data sekunder dengan metode regresi linear berganda atau data Panel tahun 2006-2011 dan cross section daerah tingkat II Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kemiskinan, pengangguran dan upah minimum serta laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Secara uji parsial, Tingkat kemiskinan dan pengangguran menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar -0,163 dan -0,084 yang artinya Tingkat kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM. Sedangkan Upah minimum Kabupaten atau Kota dan laju pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,953 yang artinya berpengaruh positif terhadap IPM. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM.

Izzah dan Ignatia, (2021) yang berjudul Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series berupa data kuantitatif selama rentang waktu 2010 - 2019 pada Provinsi Jawa Barat. Pada penelitian ini menggunakan Model regresi linear berganda. Kesimpulan pada penelitian ini secara simultan menyatakan bahwa variabel tenaga kerja dan PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan secara parsial variabel tingkat upah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah dan variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Wardiah, (2021) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia periode 2011-2020. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif

atau data sekunder . Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kemiskinan dan pengangguran memiliki pengaruh senilai 92% terhadap IPM di Indonesia. Sedangkan tingkat pengangguran sebesar 0.68 yang berarti tidak berpengaruh negatif terhadap IPM. Tetapi, pada variabel tingkat kemiskinan sebesar -1.84 yang berarti memiliki dampak negatif terhadap IPM. Maka dapat disimpulkan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yang lebih baik.

Dewi, (2017) yang berjudul Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat statistika dan dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia. secara parsial variabel kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat IPM di Provinsi Riau.

Ningrum dkk, (2020) yang berjudul Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta pengeluaran pemerintah terhadap indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari data 33 provinsi di Indonesia dengan rentang waktu 2014-2018. Penelitian ini menunjukkan hasil secara simultan variabel, kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan, pada uji parsial variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 33 provinsi di Indonesia, namun pada variabel pertumbuhan ekonomi dan variable pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 33 provinsi di Indonesia.

Faizin, (2021) yang berjudul Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan metode regresi data panel tahun 2010-

2018 pada 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. Penelitian ini memberikan hasil bahwa secara simultan, variabel independen yaitu Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara parsial, variabel kemiskinan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap IPM, variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel upah minimum berpengaruh positif serta signifikan terhadap IPM.

Herman, (2018) yang berjudul Pengaruh Upah Minimum Kota (Umk) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru (2009-2016). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data perkembangan IPM, upah minimum Kabupaten atau Kota tahun 2009-2016 kota Pekanbaru dengan metode analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum kota berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Pekanbaru.

Megantara dan Made, (2020) yang berjudul Pengaruh Angka Melek Huruf Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten atau Kota Di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data sembilan Kabupaten atau Kota di Provinsi Bali dengan kurun waktu 2013 hingga 2018 serta menggunakan metode analisis jalur. Berdasarkan analisis menunjukan hasil bahwa, variabel angka melek huruf dan upah minimum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan variabel angka melek huruf serta upah minimum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Nurmainah, (2013) yang berjudul Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Jawa tengah. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan data kuantitatif 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah dengan kurun waktu 2003-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal pemerintah daerah, variabel Indeks Pembangunan Manusia, dan variabel penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, variabel

pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Mahidoy dkk, (2018) yang berjudul Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan analisis table dengan data kuantitatif time series kurun waktu 2007-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat upah minimum dan variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kota Manado berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pengangguran di Kota Manado.

Dewi dkk, (2021) yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistika. Metode Analisis Regresi Linear Berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM Kabupaten Bojonegoro, namun kemiskinan secara signifikan berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro.

Kiha dkk, (2021) yang berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari kantor Badan Pusat statistik Kabupaten Belu dan Metode yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Jumlah penduduk, pengangguran serta kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Primandari (2019) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS dengan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia, kemudian, variabel Pengangguran memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004-2018.

Secara simultan, variabel Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Handayani dan Woyanti, (2021) yang berjudul Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran dan Belanja Modal terhadap Ipm Di 35 Kabupaten atau Kota Jawa Tengah Tahun 2011 - 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan regresi panel data dan metode Fixed Effect. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap IPM, variabel Kemiskinan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM, sedangkan variabel pengangguran dan belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM.

Chisti, (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan. Metode yang digunakan berupa analisis regresi berganda data panel. Data yang digunakan adalah time series dengan periode 2007 hingga 2013 dan data cross section dari 6 Provinsi di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel indeks pembangunan manusia secara langsung memiliki pengaruh terhadap tingkat Kemiskinan, namun Tingkat Pengangguran terbuka secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 6 Provinsi di Pulau Jawa, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan variabel upah minimum provinsi bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini diakibatkan distribusi pendapatan dan penggunaan upah minimum yang tidak merata.

Ristika dkk, (2021) yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif tahun 2009 hingga 2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan model OLS. Penelitian ini menunjukkan variabel Jumlah penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan secara parsial, variabel jumlah penduduk dan variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan

terhadap tingkat kemiskinan provinsi Jawa Timur. Namun, Tingkat Pengangguran (TPT) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Panjaitan, (2021) yang berjudul Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011-2020. Metode yang digunakan regresi data panel model fixed Effect (FEM). Data yang digunakan data kuantitatif Provinsi DKI Jakarta tahun 2011-2020 dengan data cross section 6 kabupaten atau kota di Provinsi DKI Jakarta tahun 2011-2020. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Upah minimum memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan variabel Indeks pembangunan manusia dan variabel Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi DKI Jakarta tahun 2011-2020.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM atau Human Development Indeks merupakan ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dibentuk berdasarkan tiga komponen pokok yaitu umur panjang dan sehat, pendidikan dan pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Pada IPM metode terbaru komponen umur panjang dan hidup sehat diukur melalui umur harapan hidup saat lahir, kemudian Pendidikan diukur melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta standar hidup layak diukur melalui Produk Nasional Bruto (PNB) (BPS, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, yang diklasifikasikan menjadi negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang serta berfungsi untuk mengukur kinerja dan tingkat keberhasilan membangun kualitas hidup manusia dan pengambilan keputusan kebijakan, IPM juga berfungsi sebagai data strategis yang digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut Amartya Sen, “kelaparan terjadi bukan karena kekurangan bahan pangan namun karena tidak meratanya pembangunan pemerataan distribusi makanan” (Putra, 2019). Hal ini dikarenakan adanya sistem dan kebijakan yang tidak merata dan adil. Tingkat kelaparan yang sangat tinggi disebabkan ekonomi dan sosial contohnya seperti menurunnya upah pekerja, pengangguran, inflasi serta mekanisme distribusi yang tidak merata dan akan menyebabkan kemiskinan.

Peran Indeks Pembangunan Manusia tentu sangat penting untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusia yang ada. Pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus utama dari semua aktivitas yang ada; pembangunan perekonomian, pembangunan fisik, sarana dan prasarana lainnya akan berakhir sia-sia tanpa ada kesiapan dari masyarakatnya. Pembangunan manusia adalah proses dalam memperluas pilihan-pilihan bagi para penduduk (a process of enlarging people's choice). (Ridwan dan Hajjali, 2022)

Dalam penghitungan IPM terdapat rumus untuk menghitungnya, Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Keterangan:

X1 = indeks harapan hidup sehat

X2 = tingkat pendidikan

X3 = indikator kemampuan daya beli (standar hidup yang layak)

2.2.2 Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang diberikan pengusaha dalam menentukan upah dari pekerja atau buruh di perusahaannya.

Pengertian upah menurut PerPem Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 tentang pengupahan. Upah merupakan imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang dan menjadi hak bagi pekerja atau buruh termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas pekerjaan yang telah dilakukan yang dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-

undangan (PerPem, 2015). Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah dan setiap tahun akan berubah yang menyesuaikan tujuan diterapkannya upah minimum. Fungsi adanya upah minimum yaitu:

1. Untuk memberikan arti dan peranan pekerja atau buruh dalam subsistem suatu hubungan kerja
2. Untuk melindungi serikat pekerja dari pengupahan yang begitu rendah
3. Untuk memberikan dorongan agar pekerja mendapatkan upah yang sesuai nilai pekerjaan
4. Untuk memberikan jaminan perusahaan dan para pekerja suatu ketentraman dalam pekerjaannya.
5. Memberikan dorongan untuk meningkatkan standar hidup.

Upah minimum terdapat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER-01/MEN/1999 mengenai Upah Minimum. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP-726/ MEN/ 2000 mengenai perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, 21. Upah Minimum merupakan upah terendah dalam periode bulanan yang mencakup dari Upah pokok serta tunjangan tetap (PerMen, 1999). Upah minimum terbagi menjadi:

1. Upah minimum Provinsi, adalah upah minimum bagi seluruh Kabupaten atau Kota Kabupaten disuatu Provinsi.
2. Upah Minimum Kabupaten atau Kota yaitu Upah minimum secara resmi untuk di Daerah Kabupaten atau Kota.
3. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), adalah Upah minimum yang berjalan resmi secara sektoral di daerah Kabupaten atau Kota di suatu Provinsi.
4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota, adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral untuk di daerah Kabupaten atau Kota.

Upah mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa, Sesuai yang tercantum pada Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan 2003: dalam perusahaan yang dinyatakan pailit atau likuidasi atas dasar perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak para pekerja atau buruh

menjadi utang yang harus didahulukan pembayarannya. Artinya, pekerja atau buruh wajib dibayarkan lebih awal dibandingkan utang-utang lainnya (Konstitusi, 2014).

2.2.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi disuatu wilayah dimana masyarakat disuatu tempat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya atau bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyebab kemiskinan sangat kompleks dan dipicu oleh banyak variabel tertentu, seperti: Pengangguran, Pendidikan, pengetahuan dan keahlian, Kesehatan, sumber daya rendah dan sebagainya. Masyarakat yang memiliki Pendidikan, pengetahuan dan keahlian yang rendah cenderung sulit untuk bersaing didunia pekerjaan, ketika mereka sulit mendapat pekerjaan atau menganggur maka mereka tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat ini hanya memikirkan untuk mencukupi kebutuhan pokok dihari ini saja, maka dari itu kebutuhan lainnya seperti Kesehatan dan Pendidikan jadi tidak terpenuhi, dan hal ini terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan taraf standar hidup yang selalu menurun. Tingkat Kemiskinan dapat dikurangi dengan seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan manusianya (Wongdesmiwati, 2009).

Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau mereka yang mengalami kesulitan memiliki uang ataupun barang dalam menanggung kelangsungan hidupnya. Menurut Bappenas (2008), didefinisikan kemiskinan suatu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak, termasuk kebutuhan pokok makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari serta non-makanan seperti rumah, kesehatan, pendidikan, transportasi, pakaian, serta barang atau jasa lainnya.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak bisa memenuhi, mempertahankan dan mengembangkan hak-hak dasarnya dalam kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan

pokok seperti: makanan, kesehatan, tempat berlindung, pendidikan, dan pakaian.

Adapun menurut Kuncoro (2000), Penyebab kemiskinan sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan berasal karena terdapat ketidaksamaan dalam kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata, masyarakat yang miskin hanya mempunyai sumber daya yang jumlahnya terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul yang disebabkan adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang rendah dan mengakibatkan produktivitas dan upahnya rendah.
3. Kemiskinan karena tidak adanya akses modal.

Kemiskinan dapat dipicu oleh terbatasnya sarana pemenuhan kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Bappeda, 2011). Sulitnya akses Pendidikan, pekerjaan, dan Kesehatan menyebabkan taraf hidup manusia tersebut akan selalu menurun dan kemiskinan ini akan berpengaruh besar terhadap indeks pembangunan manusia.

2.2.4 Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno (2000), kondisi seseorang atau individu yang termasuk dalam usia kerja namun belum mendapatkan pekerjaan maka itu disebut pengangguran. Pengangguran disebabkan oleh tingginya suatu Angkatan tenaga kerja namun tidak diikuti oleh tersedianya lapangan pekerjaan yang tinggi. Klasifikasi pengangguran berdasarkan cirinya, terdiri dari: 1) pengangguran terbuka, 2) pengangguran tersembunyi, 3) setengah menganggur, dan 4) pengangguran bermusim (Sukirno, 2000). Pengangguran terbuka bisa diartikan suatu Angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (Mujahid, 2011). Menurut Sukirno (2004), Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan dan sedang mencari sebuah pekerjaan.

Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa pengangguran adalah seseorang, ataupun sekelompok yang sudah termasuk usia Angkatan tenaga kerja namun belum memiliki pekerjaan ataupun sedang mencari pekerjaan. Adapun rumus dalam menghitung tingkat pengangguran terbuka adalah:

$$TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Tenaga kerja mencakup angkatan kerja serta tidak angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari kelompok yang bekerja, kelompok menganggur dan yang sedang mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja mencakup orang yang bersekolah, orang yang mengurus rumah tangga dan golongan lainnya yang menerima pendapatan (Simanjuntak, 2001).

Pengangguran dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya:

1. pengangguran penuh atau terbuka yaitu orang yang tidak bekerja (open employed) dan berusaha mencari pekerjaan.
2. Orang yang setengah menganggur (under employed) yaitu mereka yang kurang produktif dalam bekerja (under utilized) dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan. Setengah menganggur dikategorikan dalam 2 kelompok yaitu:
 - 1) Setengah penganggur kentara, (visible underemployed) adalah orang yang bekerja tidak lebih dari 35 jam seminggu.
 - 2) Setengah menganggur tidak kentara (invisible under employed) ataupun pengangguran terselubung (Disguised unemployed) yaitu orang yang bekerja namun produktivitas kerja dan pendapatannya rendah.

Adapun pengangguran berdasarkan penyebabnya sebagai berikut:

1. Pengangguran Struktural
Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan kemampuan tenaga kerja tidak bisa mengikuti.
2. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang disebabkan karena adanya dampak perubahan dalam perekonomian.

3. Pengangguran Friksional

Pengangguran ini disebabkan karena susahnya tenaga kerja mendapatkan informasi lowongan pekerjaan.

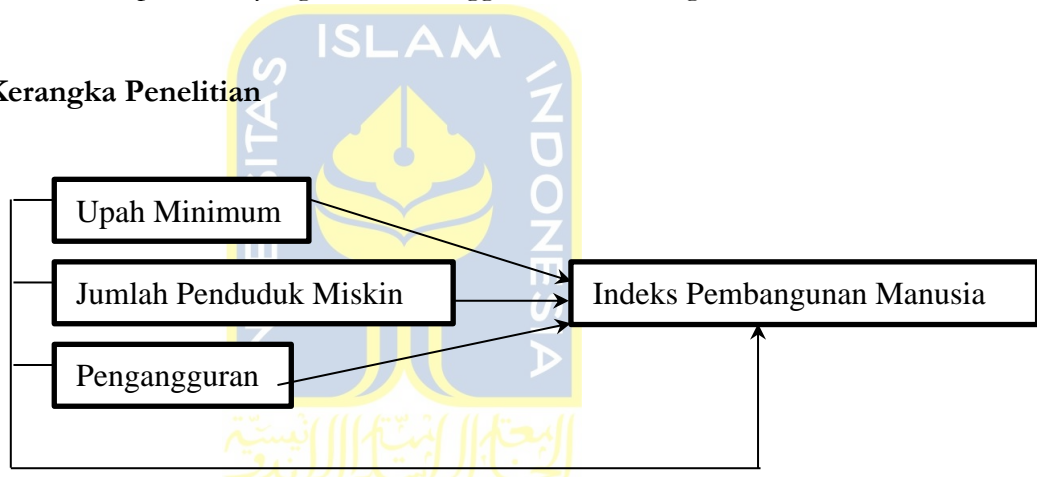
4. Pengangguran Musiman

Pengangguran yang dikarenakan adanya perubahan musim. Contohnya petani yang bekerja di musim tanam dan musim panen.

5. pengangguran Teknologi

Pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor produksi yang beralih menggunakan teknologi atau mesin.

2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Diduga adanya pengaruh Upah Minimum yang signifikan **serta positif dan negatif** terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H2 : Diduga adanya pengaruh **Jumlah Penduduk Miskin** yang signifikan **dan arahnya negatif** terhadap Indeks Pembangunan Manusia .

H3 : Diduga adanya pengaruh pengangguran yang signifikan dan arahnya negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini merupakan data kuantitatif atau dengan menggunakan data sekunder. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data yang diangkakan (*scoring*) (Sugiyono, 2017). Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau skor dan bisa dianalisis dalam teknik statistik. Data kuantitatif atau sekunder ini tersedia di website instansi atau Lembaga pemerintahan negara dan Lembaga resmi yang mengumpulkan data-data. adapun data sekunder yang digunakan adalah data Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran di Riau pada rentang tahun 2011 - 2021. Data-data tersebut dikumpulkan melalui sumber dari Badan Pusat Statistik, Ditnakertrans Riau, BPS Provinsi Riau dan Bappeda Provinsi Riau.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen). Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini berupa Indeks Pembangunan Manusia. Pengukuran variabel indeks pembangunan manusia dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Pada 1990 IPM dikenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan dipublikasikan secara periodik dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR), serta diterbitkan juga oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia setiap tahunnya (BPS, 2022). Data indeks pembangunan manusia dinyatakan dalam Indeks.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independennya yaitu:

1. Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh pada pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Data yang digunakan adalah Upah Minimum Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau 2011 - 2021 dan menggunakan satuan rupiah

2. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok penduduk tidak bisa atau sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga seseorang ini berada ditaraf miskin. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data penduduk miskin menurut kabupaten daerah di Provinsi Riau pada tahun 2011 - 2021. Data ini menggunakan satuan jiwa.

3. Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang sudah masuk usia angkatan kerja 15-64 tahun namun belum memiliki pekerjaan ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Menurut Mujahid (2011), Pengangguran terbuka bisa diartikan Angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan atau sedang mencari pekerjaan. Pada penelitian ini data pengangguran yang digunakan adalah data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau dalam periode 2011 – 2021 dengan persentase.

3.3 Metode Analisis

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Regresi data panel adalah regresi yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*, pada penelitian ini data *time series* yang digunakan yaitu periode 11 tahun (2011-2021) sedangkan, unit *cross section* berdasarkan data variabel independent dari 12 kabupaten di Riau pada waktu yang sama. Penelitian ini membutuhkan banyak informasi dari data yang cukup banyak sehingga dapat mengurangi kolinearitas (*collinearity*) dari variabel yang diamati, serta lebih efisien dengan memberikan lebih banyak derajat bebas (*degree of freedom*) maka dari itu

penelitian ini sangat baik menggunakan metode regresi data panel dengan kelebihan tersebut dalam menganalisis pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.

3.3.1 Persamaan Regresi Data Panel

Adapun Persamaan regresi data panelnya sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \text{net} + U_{it} \dots (1)$$

Keterangan:

Y_{it} : Variabel Terikat (*dependent*)

X_{it} : Variabel Bebas (*independent*)

i : entitas ke- i

t : periode ke- t

Maka, dapat di rumuskan pada model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{irt} = \beta_0 + \beta_1 X_{1irt} + \beta_2 X_{2irt} + \beta_3 X_{3irt} + U_{irt} \dots (2)$$

Keterangan:

Y : Indeks Pembangunan Manusia

X_1 : Upah Minimum (rupiah)

X_2 : Jumlah Penduduk Miskin (jiwa manusia)

X_3 : pengangguran (persentase)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien variabel independen

β_0 : Efek grup atau individu dari unit *cross section* ke- i

i : Klasifikasi IPM

r : Kabupaten atau Kota

t : Waktu (tahun 2011 – 2021)

U_{it} : Variabel IPM

3.4 Pendekatan Model Regresi Data Panel

Terdapat empat teknik mengestimasi regresi data panel antara lain: Model OLS, model *fixed effect* LSDV (*Least Square Dummy Variable*), model *fixed effect within-group*, serta model *random effect* (Gujarati, 2013). Tiga model yang digunakan

dalam regresi data panel, yaitu model dengan metode *Common Effect Model* (OLS), model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect* (Ansofino, 2016).

3.4.1 *Common Effect Model (CEM)*

Common Effect Model adalah model yang hanya mengkombinasikan data time series dan cross section, Maka dapat digunakan estimasi metode Ordinal Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Pada metode ini tidak memperhatikan pendekatan unsur individu maupun waktu (Gujarati N. D., 2012). Karakter data antar variabel dianggap sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini sangat berbeda pada kenyataan yang sebenarnya, karena karakteristik antar variabel baik dari segi kewilayahan maupun budaya social dan ekonomi. Menurut Mahulete (2016), persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + y_{it} \dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Indeks Pembangunan Manusia
- X_1 : Upah Minimum (rupiah)
- X_2 : Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
- X_3 : pengangguran (persen)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3,$: Koefisien variabel independen
- β_0 : Efek grup atau individu dari unit *cross section* ke $-i$
- i : Provinsi Riau
- t : Waktu (tahun 2011 - 2021)

3.4.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel pada metode common effect maka digunakan Model FEM, hasil data panel *common effect* memberikan reaksi tidak realistis karena *intercept* dan *slope* dalam data panel baik antar individu (cross section) ataupun waktu (time series) tidak ada yang berubah (Mahulete, 2016). Dengan menambahkan variabel dummy model ini berfungsi juga mengestimasi data panel. Pada model ini diasumsikan adanya efek yang berbeda antar individu. Perbedaan ini akan diakomodir dengan perbedaan diintersepnya.

Maka persamaan regresi dengan model *Fixed Effect* dan asumsi *slope* regresi tetap, akan tetapi *intercept* berbeda-beda setiap unit (Sriyana, 2014).

$$Y_{it} = \beta_0i + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it} \dots(2)$$

Keterangan:

I : Banyaknya observasi (1,2,...,n)

t : Banyaknya waktu (1,2,...,t)

$n \times t$: Banyaknya data panel

ε : residual

3.4.3 *Random Effect Model (REM)*

Model ini digunakan untuk mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing variabel. Kelebihan penggunaan model *Random Effect* yaitu akan menghapuskan heteroskedastisitas. Model REM ini juga dikenal dengan *Error Component Model (ECM)* atau *Generalized Least Square (GLS)*. Berikut persamaan model *random effect* dengan asumsi *intercept* dan *slope* antar individu berbeda (Sriyana, 2014):

$$Y_{it} = \beta_0i + \sum_{k=1}^m \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it} \dots(3)$$

Keterangan:

i : Banyaknya Observasi (1,2,..., n)

t : Banyaknya Waktu (1,2,..., n)

$n \times t$: Banyaknya data panel

ε : residual

3.5 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam memilih model regresi data panel dilakukan beberapa uji agar mendapat model yang terbaik, Adapun pemilihan modelnya sebagai berikut:

3.5.1 Uji Chow

Uji chow adalah uji yang berfungsi menentukan metode yang tepat digunakan dalam pemodelan data panel yakni antara metode *common effect* atau metode *fixed effect*. Hipotesis dalam uji chow ini sebagai berikut (Ghozali, 2016):

H0: Model *Common Effect* lebih baik daripada model *Fixed Effect*

Ha: Model *Fixed Effect* lebih baik daripada model *Common Effect*

Apabila hasil uji ini menunjukkan probabilitas Chi-Square lebih dari taraf signifikansi 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-Square kurang dari taraf signifikansi 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah model *fixed effect*.

3.5.2 Uji Hausman

Uji Hausman yaitu untuk menentukan uji mana yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan data panel diantara kedua model *random effect* atau model *fixed effect*. Adapun Hipotesis pada uji Hausman sebagai berikut:

Ho: Model Random Effect lebih baik daripada Fixed Effect Model

Ha: Model Fixed Effect lebih baik daripada Random Effect Model

Jika probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka Ho diterima dan model yang tepat adalah Model Random Effect. Sebaliknya, apabila probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka Ho ditolak dan model yang tepat adalah model Fixed Effect.

3.5.3 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier (LM) adalah Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan uji mana yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan data panel diantara model *random effect* atau *common effect* (OLS). Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi *Random Effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS.

Hipotesis yang digunakan adalah:

H0: Model *Random Effect* lebih baik daripada model *Common Effect*

Ha: Model *Common Effect* lebih baik daripada model *Random Effect*

Jika nilai prob. > 0.05 maka H0 diterima sehingga model yang tepat adalah model *Random effect*. sebaliknya jika nilai prob. < 0.05 maka Ha diterima dan model yang dipilih adalah model *common effect*.

3.6 Pengujian Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat and menguji di dalam model apakah ada korelasi antar variabel independen. Apabila terdapat korelasi, Maka diartikan adanya masalah Multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Standar pengujian multikolinearitas diterapkan dengan melihat dan mengamati rasio angka mean VIF (*Variance Inflation Factor*) serta rasio toleransinya. Jika rasio mean VIF dibawah 4 dan atau rasio toleransinya mendekati 1, Maka dapat disimpulkan model regresi yang ada tidak ditemukan gejala multikolinearitas (Ansofino, 2016).

3.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain terdapat ketidaksamaan varian dalam residual. Apabila varians dari pengamatan atau residual yang lainnya tetap, artinya disebut homokedastisitas. Sebaliknya apabila varian yang ada berbeda artinya disebut heterokedastisitas. Uji Glejser dapat menguji atau mendeteksi apakah suatu varian terdapat heterokedastisitas, dengan syarat apabila nilai absolut residualnya pada signifikan variabel independent $> 0,05$ artinya tidak terdapat gejala heterokedastisitas, sebaliknya apabila tingkat signifikan $< 0,05$ artinya terdapat heterokedastisitas (Ansofino, 2016). Kemudian terdapat cara lain yaitu melihat dan mengamati grafik scatter plot antar nilai prediksi variabel dependen dan nilai residualnya.

3.6.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan kondisi ketika adanya gangguan variabel pada suatu waktu berkorelasi dengan variabel pada waktu lainnya, maka diartikan variabel gangguan tidak teratur atau acak. Adapun faktor yang mengakibatkan autokorelasi yaitu penggunaan lag dalam model, kesalahan pada penggunaan model, atau memasukkan variabel yang penting. Sehingga berakibat adanya autokorelasi berdampak juga pada parameter yang diestimasi menjadi bias dari varian minimum, maka hal ini menjadi tidak efisien. Dalam menguji apakah suatu yang diestimasi terdapat atau tidaknya korelasi dapat digunakan uji Breusch-Godfrey, apabila nilai signifikan Prob- Chi square > 0,05 maka model tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi (Basuki, 2015).

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji F

Uji F adalah uji untuk melihat apakah secara bersama-sama atau simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen di dalam model (Ghozali, 2016). Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel upah minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran secara bersama – sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Riau. Pengujian hipotesis untuk uji F menggunakan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{r^2(k-1)}{(1-r^2)(n-k)}$$

Keterangan:

r^2 = Koefisien Korelasi

k = Jumlah variabel independen

n = Banyaknya sampel

Ho :Secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Ha :Secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

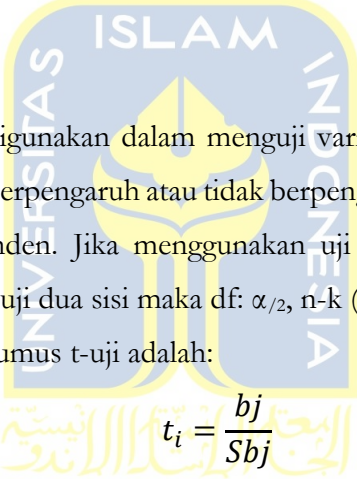
Kriteria dalam pengambilan keputusan ditentukan sebagai berikut:

1. Menggunakan nilai probabilitas signifikansi:
 - 1) Jika tingkat signifikansi atau P-Value > 0,05 maka H_0 diterima, dan H_a ditolak.
 - 2) Jika tingkat signifikansi atau P-Value < 0,05 maka H_0 ditolak, dan H_a diterima.
2. Membandingkan F hitung dengan F tabel:
 - 1) Apabila F hitung > F tabel sehingga H_0 ditolak, dan H_a diterima.
 - 2) Apabila F hitung < F tabel sehingga H_0 diterima, dan H_a ditolak (Sriyana, 2014).

3.7.2 Uji T

Uji t digunakan dalam menguji variabel independen secara parsial atau individu berpengaruh atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika menggunakan uji satu sisi, maka df: $\alpha, n-k$, jika menggunakan uji dua sisi maka df: $\alpha/2, n-k$ (Suliyanto, 2011).

Adapun rumus t-uji adalah:


$$t_i = \frac{b_j}{S_{b_j}}$$

Keterangan:

t_i : Nilai t hitung

b_j : Koefisien regresi

sb_j : Kesalahan baku Koefisien regresi

H_0 : Secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_a : Secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) jika nilai prob signifikan $t > \alpha$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- 2) jika nilai prob signifikan $t < \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Sriyana, 2014)

Maka dari itu, hipotesis diterima apabila:

1. $\beta_1 \leq 0,05$ H_0 ditolak, maka variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 - 2021.
 $\beta_1 > 0,05$ H_0 diterima, maka variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 - 2021.
2. $\beta_2 \leq 0,05$ H_0 ditolak, maka variabel Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 - 2021.
 $\beta_2 > 0,05$ H_0 diterima, maka variabel Jumlah Penduduk Miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 - 2021.
3. $\beta_3 \leq 0,05$ H_0 ditolak, maka variabel Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 - 2021.
 $\beta_3 > 0,05$ H_0 diterima, maka variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2011 - 2021.

3.8 Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Analisis R² berfungsi dalam mengetahui tingkat persentase pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. R² berguna sebagai alat pengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan varian variabel dependen yang ada (Ghozali, 2016). R² berkisar 0 - 1. Semakin besar (mendekati 1) nilai R² maka hubungan kedua variabel semakin kuat.

Koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd: Seberapa jauh perubahan variabel Y yang dipengaruhi variabel X

r^2 : Koefisien korelasi yang dikuadratkan

Semakin kecil rasio koefisien determinasi maka semakin kecil atau terbatas kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Sebaliknya, Semakin besar rasio koefisien determinasi maka dapat diartikan semakin besar kemampuan variabel independen untuk mendeskripsikan variabel dependen. Pada ketentuan Nilai koefisien determinasi dilihat pada nilai *adjusted* R Square bukan R Square, karena model R Square cenderung bias terhadap jumlah variabel dependen, sedangkan *adjusted* R Square jika variabel independen ditambahkan dalam model rasio dapat mengalami kenaikan dan penurunan.

Ketentuan dalam pengambilan keputusan diterapkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
- b. Apabila Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Pada analisis dan pembahasan penelitian ini akan menjelaskan pengaruh upah minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Riau. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *Fixed Effect*. Data panel yaitu gabungan data *time series* dengan kurun waktu 2011-2021 (11 tahun) dan data *cross section* dengan 12 Kabupaten atau Kota di Riau, sehingga data yang terkumpul sebanyak 132 data. Analisis penelitian menggunakan data panel ini dilakukan dengan pemilihan metode regresi data panel terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil analisis yang tepat pada estimasinya, pemilihan yang dilakukan antara *common effect* model, *fixed effect* model, dan *random effect* model. Pemilihan tersebut dilakukan dengan menggunakan uji chow, uji Hausman dan uji LM. Kemudian penelitian akan dilanjutkan dengan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa hasil estimasi persamaan regresi yang diperoleh sesuai, stabil, dan tidak bias. Terakhir akan dilakukan uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Alat olah data yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian ini yaitu aplikasi Eviews 10.

4.2 Analisis Deskriptif

Tabel 4.1 Tabel Data Statistik

	IPM	Upah Minimum	Jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran
Mean	6990.871	2,179,641.	41609.62	6.421288
Median	6988.000	2,188,240.	39410.00	6.025000
Maximum	8158.000	3,383,834.	74730.00	16.98000
Minimum	6038.000	1,125,000.	9880.000	1.900000
Std. Dev.	432.2748	652823.6	16563.20	2.544739
Skewness	0.558463	-0.040837	0.127115	0.883895
Kurtosis	3.404302	1.749544	2.175380	4.386175
Jarque-Bera	7.760401	8.636715	4.095473	27.75611

Probability	0.020647	0.013322	0.129027	0.000001
Sum	922795.0	2.88E+08	5492470.	847.6100
Sum Sq. Dev.	24478861	5.58E+13	3.59E+10	848.3163
Observations	132	132	132	132

Sumber: Hasil olah data Eviews10, 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil olah data analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau tahun 2011 -2021 sebesar 69.90. Sedangkan upah minimum rata-rata di provinsi Riau pada rentang tahun 2011-2021 sebesar Rp. 2,179,641. Angka ini sudah cukup baik dalam 11 tahun terakhir dengan tingkat inflasi di Indonesia yang meningkat. kemudian **Jumlah Penduduk Miskin** rata rata di provinsi Riau selama tahun 2011-2021 sebanyak 41,609.62 jiwa manusia dengan persentase tingkat pengangguran terbuka rata – rata sebesar 6.421288%. Persentase ini sudah baik dengan rentang 11 tahun yang tidak melebihi 10%

Nilai maksimum indeks Pembangunan Manusia pada rentang tahun 2011 – 2021 dengan **indeks** sebesar 81.58, hal ini menjadi salah satu penopang meningkatnya rata-rata IPM Indonesia selama 2010-2021 sebesar 0,76 (BPS, 2022). Peningkatan IPM 2021 tercipta dari berbagai dimensi yaitu dari umur Panjang dan Kesehatan, pengetahuan dan Pendidikan, serta standar hidup yang layak. **Indeks** IPM 81.58 tersebut di dapatkan oleh kota Pekanbaru sebagai pusat kota serta sentra ekonomi di provinsi Riau. Sedangkan berdasarkan table, nilai maksimum Upah minimum Kota dimiliki oleh kota Dumai yaitu sebesar Rp. 3,383,834 pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan karena kota dumai merupakan kota industri dan dikota ini terdapat Pelabuhan kapal yang menjadi sarana ekspedisi ekspor dan impor ke luar negeri serta diakibatkan oleh tingginya IPM yang sebesar 74.75 dan tingkat pengangguran terbuka yang rendah sebesar 6.29. Untuk nilai maksimum pada tingkat pengangguran terbuka sebesar 16.98 di kabupaten Kampar di tahun 2011. Hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan perekonomian di daerah tersebut pada saat itu, sehingga terdapat **Jumlah Penduduk Miskin** sebesar 61.200 jiwa manusia. Sedangkan **Jumlah**

Penduduk Miskin maksimum terdapat di Rokan Hulu sejumlah 74.730 jiwa manusia di tahun 2021. Hal ini dikarenakan perekonomian dan lapangan pekerjaan yang tidak merata didaerah tersebut, serta SDM yang kurang memadai dalam mengelola sumber daya alam yang ada, yang ditandai dengan **indeks** IPM yang hanya mencapai 69,67.

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil olah data deskriptif, terdapat **indeks** minimum IPM di Kep. Meranti dengan nilai sebesar 60.38 pada tahun 2011. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan dari SDM masyarakat, kurangnya pemanfaatan sumber daya alam, serta tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang kurang baik, yang ditandai dengan **Jumlah Penduduk Miskin** sebesar 63.580 jiwa manusia. Sedangkan nilai minimum dari Upah minimum terdapat di kabupaten bengkalis pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 1.125.000. kebijakan pemerintah yang memberikan upah minimum yang rendah ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan tingginya investasi yang masuk di kabupaten bengkalis, Sedangkan nilai minimum pada tingkat pengangguran terbuka terdapat pada kabupaten Kuantan singingi yaitu sebesar 1.9% pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari meningkatnya lapangan pekerjaan pada sektor pertambangan dan usaha – usaha andalan yang bersumber dari sektor pertanian, hal ini juga disebabkan karena ditopangnya SDM yang memadai dengan ditandai IPM yang sangat baik pada tahun itu sebesar 66.31. Sedangkan untuk nilai minimum **Jumlah Penduduk Miskin** terdapat pada kota dumai sebesar 9880 jiwa manusia pada tahun 2020.

4.3 Hasil Analisis Penelitian

4.3.1 Pemilihan model yang tepat

4.3.1.1 Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih model yang tepat antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*.

Tabel 4.2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	df.	Prob.
Cross-section F	731.699649	(11,117)	0.0000
Cross-section Chi-square	560.409079	11	0.0000

Sumber: Hasil olah data Eviews10, 2022

Hasil uji Chow pada Tabel 4.2 menunjukkan nilai probabilitas pada Cross Section F dan Chi Square sebesar 0.0000 yang mana angka ini lebih kecil dari alpha 5% sehingga menolak hipotesis nol. Jadi model yang terbaik untuk digunakan pada penelitian ini yaitu model dengan menggunakan metode fixed effect. Berdasarkan hasil uji Chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke uji Hausman.

4.3.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang tepat antara model random effect atau model fixed effect.

Tabel 4.3 Uji Hausman

Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random		13.31376	5	3	0.0040
Cross-section random effects test comparisons:					
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.	
Upah Minimum	0.000002	0.000002	0.000000	0.0191	
Jumlah Penduduk Miskin	-0.006886	0.005786	0.000001	0.1881	
Tingkat Pengangguran	0.000026	0.000021	0.000000	0.0181	

Sumber: Hasil olah data Eviews10, 2022

Hasil uji Hausman pada Tabel 4.3 diatas, menunjukkan hasil didapatkan nilai probabilitas pada Cross Section random sebesar 0.0040 lebih kecil dari alpha 5% sehingga menolak hipotesis nol. Jadi model yang dipilih pada penelitian ini yaitu model dengan menggunakan metode fixed effect.

4.3.1.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih model yang tepat antara model *random effect* atau *common effect*. Pada hasil uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa pemilihan model yang

tepat adalah *fixed Effect* model, maka Uji Lagrange Multiplier (LM) dapat diabaikan.

4.3.2 Uji statistik dengan model fixed effect

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1irt} + \beta_2 X_{2irt} + \beta_3 X_{3irt} + e_{it}$$

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Upah Minimum } irt + \beta_2 \text{Jumlah Penduduk Miskin } irt + \beta_3 \text{Pengangguran } irt + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : Indeks Pembangunan Manusia

X_1 : Upah Minimum Kota

X_2 : Jumlah Penduduk Miskin

X_3 : Tingkat Pengangguran Terbuka

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien variabel independen

β_0 : Efek grup atau individu dari unit cross section ke- i

i : Klasifikasi IPM

r : Kabupaten atau Kota

t : Waktu (tahun 2011 – 2021)

e_{it} : Variabel IPM

4.3.3 Pengujian Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

	Upah Minimum	Jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran
Upah Minimum	1.000000	-0.063780	-0.267254
Jumlah Penduduk Miskin	-0.063780	1.000000	-0.111825
Tingkat Pengangguran	-0.267254	-0.111825	1.000000

Sumber: Hasil olah data Eviews10, 2022

Hasil uji multikolinearitas berdasarkan Tabel 4.4 diatas, menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak melebihi 0,90 (Ghozali, 2013). Jika rasio mean dibawah 4 dan atau rasio toleransinya mendekati 1, Maka dapat disimpulkan model regresi yang ada tidak ditemukan gejala multikolinearitas (Ansofino, 2016). Sehingga dapat diambil kesimpulannya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas.

4.3.3.2 Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.195298	1.077477	2.965536	0.0037
Upah Minimum	1.35E-08	1.40E-07	0.096728	0.9231
Jumlah Penduduk Miskin	0.005479	0.045868	0.119457	0.9051
Tingkat Pengangguran	-1.50E-05	2.24E-05	-0.672514	0.5026

Sumber: Hasil olah data Eviews10, 2022

Olah data tidak dapat menunjukkan hasil, bisa jadi karena jumlah *cross section* tidak terlampau banyak.

4.3.3.3 Uji Autokorelasi

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

F-statistic	148.3725	Prob. F(2,126)	1.8647
Obs*R-squared	92.65713	Prob. Chi-Square(2)	1.8472

Sumber: Hasil olah data Eviews10, 2022

Hasil uji Autokorelasi pada Tabel 4.6 diatas, menunjukkan hasil bahwa nilai signifikan Prob Chi-Square menunjukkan nilai sebesar 1,8472 >0,05, maka H0 diterima serta dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah atau gangguan autokorelasi.

4.3.4 Pengujian Hipotesis

Model fixed Effect

Tabel 4.7 Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6385.366	50.00394	127.6973	0.0000
Upah Minimum	0.000231	6.48E-06	35.63149	0.0000
Jumlah Penduduk Miskin	-0.002565	0.001038	-2.470843	0.0149
Tingkat Pengangguran	-0.688618	2.128648	-0.323500	0.7469
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.990834		F-statistic	903.3479
Adjusted R-squared	0.989737		Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil olah data Eviews10, 2022

Hasil pengujian olah data fixed effect pada Tabel 4.7, menunjukkan interpretasi bahwa nilai konstanta IPM sebesar 63,85 apabila semua Variabel independen yaitu Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat pengangguran tidak terjadi perubahan nilai atau nilainya tetap. Kemudian, Koefisien regresi variabel upah minimum bernilai positif dapat diartikan variabel independen dan variabel dependennya bersifat searah. Sehingga apabila upah minimum pekerja mengalami peningkatan maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan mengalami peningkatan. Kemudian hasil penelitian memperoleh koefisien regresi pada variabel **Jumlah Penduduk Miskin** dan pengangguran yang bernilai negatif, Maka dapat diartikan arah pengaruh variabel independent dan variabel dependen berlawanan arah. Sehingga artinya apabila **Jumlah Penduduk Miskin** dan

pengangguran meningkat, Maka mengakibatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh mengalami penurunan.

4.3.4.1 Uji F

Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.7, menunjukkan nilai probabilitas F lebih kecil dari α atau $0,000 < 0,05$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan (uji F) atau secara bersama-sama variabel independent (upah minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan pengangguran) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

4.3.4.2 Uji T

Hasil uji olah data model fixed effect pada Tabel 4.7, menunjukkan hasil variabel Upah Minimum pada nilai koefisien regresi sebesar 0.000231 dan Prob. $0.000 < \alpha (0.05)$ maka menolak H_0 artinya variabel Upah minimum (UMK) berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia (IPM). Adapun nilai koefisien regresi mengartikan variabel Upah Minimum memiliki pengaruh positif pada alpha 5% terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten atau Kota pada Provinsi Riau.

Pada variabel **Jumlah Penduduk Miskin** dinyatakan nilai koefisien regresi sebesar -0.002565 dan Prob. $0.0149 < \alpha (0.05)$ maka menolak H_0 artinya variabel **Jumlah Penduduk Miskin** berpengaruh signifikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Nilai koefisien regresi mengartikan bahwa variabel Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif pada alpha 5% terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten atau Kota pada Provinsi Riau

Pada variabel Pengangguran ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar -0.688618 dan Prob. $0.7469 > \alpha (0.05)$ maka menerima H_0 artinya variabel Pengangguran tidak

berpengaruh signifikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Nilai koefisien regresi mengartikan bahwa variabel Pengangguran memiliki pengaruh negatif pada alpha 5% terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten atau Kota pada Provinsi Riau

4.3.5 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji model *Fixed Effect* pada Tabel 4.7, didapatkan bahwa nilai R^2 sebesar 0.990834, atau dapat diartikan sebesar 99.08%. Maka, variasi dalam model variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dapat dijelaskan oleh variabel Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin serta Pengangguran dan sisanya 0.92% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Upah minimum dan indeks pembangunan manusia di Riau

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan model *Fixed Effect*, penelitian menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.000231, menunjukkan bahwa jika Upah Minimum Kabupaten naik 1% maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan naik sebesar 0.000231 dan sebaliknya jika Upah Minimum Kabupaten turun 1% maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan turun sebesar 0.000231. Hal tersebut terjadi karena upah masyarakat yang mengalami kenaikan, otomatis akan meningkatkan daya beli atau masyarakat akan mudah dalam memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan pangan, kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan. Sehingga ketika daya dalam memenuhi kebutuhannya meningkat maka akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia juga akan ikut meningkat. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan penelitian Faizin (2021), yang menyebutkan variabel upah minimum berpengaruh positif serta

signifikan terhadap IPM di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur, serta penelitian Herman (2018), yang menyatakan bahwa bahwa variabel upah minimum kota berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Pekanbaru, dan penelitian Megantara dan Made (2020), yang menyebutkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Mahidoy dkk, (2018), Izzah dan Ignatia, (2021) yang menyatakan bahwa Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4.4.2 **Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia di Riau**

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model fixed effect, menunjukkan hasil bahwa variabel Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.002565. Hal ini menunjukkan bahwa jika Jumlah Penduduk Miskin mengalami peningkatan 1% maka akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami penurunan sebesar -0.002565 sedangkan jika Jumlah Penduduk Miskin mengalami penurunan 1% Maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan mengalami kenaikan sebesar -0.002565. Penelitian ini sesuai dengan teori kemiskinan absolut yaitu suatu penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, penduduk hidup dibawah kemiskinan internasional atau dibawah pendapatan riil minimum (Todaro M. P dan Smith, 2006).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup manusia karena ketika Jumlah Penduduk Miskin menurun maka artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih termasuk memenuhi kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan sehingga kemampuan ini akan berdampak

akan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia karena produktivitas juga meningkat.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kemiskinan pada suatu daerah dapat dikurangi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya melalui proses pembangunan manusianya (Wongdesmiwati, 2009). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hipotesis yang ada bahwa adanya pengaruh signifikan **Jumlah Penduduk Miskin** terhadap Indeks Pembangunan Manusia, serta penelitian sejalan dengan penelitian Ningrum dkk, (2020), dan Dewi dkk, (2021) yang menyebutkan Kemiskinan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia serta penelitian Wardiah, (2021), dan Nurmainah, S. (2013), yang menyatakan bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif Indeks Pembangunan Manusia. Namun, penelitian ini berbeda pada penelitian Faizin (2021) yang menyebutkan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4.4.3 Tingkat Pengangguran dan indeks pembangunan manusia di Riau

Berdasarkan uji model fixed effect, menyatakan hasil bahwa variabel Pengangguran tidak berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.688618. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pengangguran mengalami kenaikan 1% maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan mengalami penurunan senilai -0,688618 dan sebaliknya jika Pengangguran mengalami penurunan 1% Maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan mengalami kenaikan sebesar - 0.688618. Penelitian ini berbeda dengan dengan teori yang ada Mankiw (2006), yaitu kesejahteraan masyarakat akan menurun ketika pengangguran meningkat, sehingga IPM akan mengalami penurunan karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya karena tidak memiliki penghasilan.

Adapun Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Faizin (2021), dan Ningrum dkk (2020), yang menyebutkan Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pengangguran yang mengalami penurunan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Riau namun pengaruh yang diberikan tidak signifikan atau secara langsung. Hal ini disebabkan oleh dua sebab yaitu: yang pertama, daerah Riau memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat di manfaatkan untuk menghasilkan pendapatan seperti pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu pendorong PDB di riau sehingga pengangguran yang terjadi tidak berlangsung lama dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Riau.

Tabel 4.7 Indeks Pembangunan Manusia

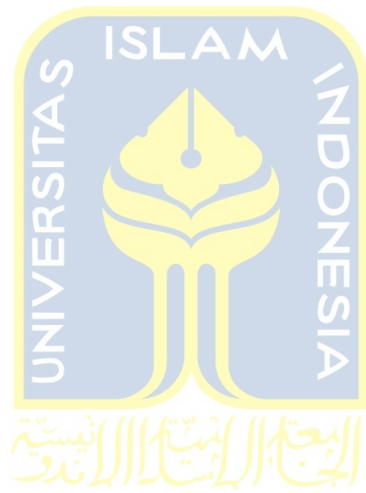
No.	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) [Metode Baru]			
		2018	2019	2020	2021
1	Provinsi Aceh	71.19	71.90	71.99	72.18
2	Provinsi Sumatera Utara	71.18	71.74	71.77	72.00
3	Provinsi Sumatera Barat	71.73	72.39	72.38	72.65
4	Provinsi Riau	72.44	73.00	72.71	72.94
5	Provinsi Jambi	70.65	71.26	71.29	71.63
6	Provinsi Sumatera Selatan	69.39	70.02	70.01	70.24
7	Provinsi Bengkulu	70.64	71.21	71.40	71.64
8	Provinsi Lampung	69.02	69.57	69.69	69.90
9	Provinsi Kepulauan Bangka	70.67	71.30	71.47	71.69
10	Provinsi Kepulauan Riau	74.84	75.48	75.59	75.79
11	Provinsi DKI Jakarta	80.47	80.76	80.77	81.11
12	Provinsi Jawa Barat	71.30	72.03	72.09	72.45
13	Provinsi Jawa Tengah	71.12	71.73	71.87	72.16

14	Provinsi Jawa Timur	70.77	71.50	71.71	72.14
----	---------------------	-------	-------	-------	-------

Sumber: BPS 2022

Yang kedua, IPM diukur melalui tiga aspek pokok yaitu aspek umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Berdasarkan tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi di Indonesia dari tahun 2018-2021, menunjukkan bahwa indeks provinsi Riau selalu diatas 72, bahkan lebih tinggi di banding provinsi disumatera lainnya seperti: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung bahkan IPM di Riau lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa barat, Jawa tengah, dan Jawa timur. Hal ini membuktikan pembangunan manusia di Riau sudah dalam kategori baik dan berhasil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pengangguran tidak berefek langsung atau berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusiannya. Hal ini juga sesuai teori bahwa ketika manusia mampu memperoleh pendidikan dan Kesehatan maka terciptalah penduduk yang lebih maju, penduduk dengan kualitas IPM yang lebih maju dapat mengelola sumber daya alam sehingga produktivitas meningkat (Todaro M. P dan Smith, 2006).

Penelitian ini juga sesuai dan sejalan dengan penelitian Kiha, E. dkk (2021), dan Dewi, K. dkk (2021), yang menyatakan tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, serta penelitian Primandari (2019), menurutnya hal ini dapat terjadi karena adanya pengangguran friksional yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka seseorang akan cenderung memilih-milih pekerjaan sehingga mereka akan memilih menganggur sembari mencari pekerjaan yang sesuai pilihan dan keahliannya.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian mengenai Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara simultan, variabel independen yaitu Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin serta Tingkat Pengangguran bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Secara parsial, Upah Minimum memiliki pengaruh yang signifikan dan positif atau searah, maka hipotesis dapat diterima
3. Variabel Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh secara signifikan namun berlawanan arah atau negatif (berlawanan), maka hipotesis dapat diterima
4. Pengangguran memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan bersifat negatif (berlawanan) terhadap IPM, maka hipotesis tidak sesuai atau tidak dapat diterima

5.2 Saran

Peneliti menyarankan bagi penelitian berikutnya yang menggunakan topik atau model pendekatan yang sama untuk menambah variabel-variabel independent yang berbeda, menggunakan metode analisis yang lebih bervariasi, dan menggunakan rentang waktu terbaru, serta objek penelitian daerah yang berbeda. Dengan itu diharapkan akan memberikan hasil yang lebih akurat, serta lebih banyak berdasarkan atas kondisi riil yang berlaku

5.3 Implikasi

Tingkat upah minimum dan Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, untuk itu peran pemerintah harus dapat meningkatkan program dan kebijakan dalam mendorong pembangunan manusia di daerah terpencil serta meningkatkan investasi di daerah Riau. Meningkatnya sumber daya manusia di daerah Riau akan berimplikasi pada produktivitas penduduk yang tinggi, sehingga akan dapat mengundang investor datang di daerah Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansofino. (2016). *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bappeda. (2011). *Analisis Statistik Perencanaan Pembangunan*. Pekanbaru: Riau.
- Bappenas. (2004). *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- Bappenas. (2008). *Buku Panduan Perencanaan dan Pengangguran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin*. Jakarta.
- Basuki, A. T. (2015). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Mitra Aksara Mulia.
- BPS. (2022, 11 22). *Indeks Pembangunan Manusia*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS. (2022, November 30). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94)*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia-ipm-indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29-meningkat-0-35-poin-0-49-persen-dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya-71-94.html>
- BPS. (2022, Oktober 17). *Pengertian Pendapatan Nasional*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto-lapangan-usaha.html>
- Chalid, N. &. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2).
- Chisti, N. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Branjaya*.

- Dewi K. S. dkk. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bojonegoro. *Syntax Idea*, 3(4).
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *JOM Fekon*, 4 (1).
- Faizin, M. (2021). Pengaruh upah minimum, kemiskinan dan pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 214-227.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, N. D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Vol. 5)*. (R. C. Mangunsong, Trans.). Jakarta: Salemba.
- Handayani, S. &. (2021). Pengaruh Pdrb, Kemiskinan, Pengangguran Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011 - 2019. *Business Economic Entrepreneurship*, 4(2).
- Herman. (2018). Pengaruh Upah Minimum Kota (Umk) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru 2009-2016. *Eko dan Bisnis (Riau Economics and Business Review)*, 9(1). .
- Izzah C. I. & Ignatia, M. H. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, Vol 5, 99-106.

- Kiha E. K. dkk. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07).
- Konstitusi, M. (2014, September 12). *Perusahaan Pailit, Pembayaran Upah Buruh Harus Didahulukan*. Retrieved from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10193#:~:text=Adap un%20Pasal%2095%20ayat%20\(4,merupakan%20utang%20yang%20didahulukan%20pembayarannya%E2%80%9D](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10193#:~:text=Adap un%20Pasal%2095%20ayat%20(4,merupakan%20utang%20yang%20didahulukan%20pembayarannya%E2%80%9D).
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahihody, A. Y. (2018). Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18 (3): 24 - 34.
- Mahulete, U. K. (2016). *Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mankiw, G. (2006). *Makro Ekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: SelembaEmpat.
- Megantara, D. E. (2020). Pengaruh Angka Melek Huruf Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 9 (1): 91- 119.
- Mujahid, M. &. (2011). *Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Nasikun. (2001). *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Diktat Kuliah Program Magister Administrasi Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Ningrum J. W. dkk. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks

- Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 212-22.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 20 (2): 131 - 141.
- Panjaitan, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2011-2020. *Jurnal Pengabdian Masyarakat(UlmU Keguruan dan Pendidikan)*, 104-108.
- PerMen, T. K. (1999). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Upah Minimum* . Menteri Tenaga Kerja RI.
- PerPem, R. (2015). *Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan No 78*. Pemerintah Pusat.
- Primandari, N. R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatra Selatan Priode Tahun 2008 - 2018. . *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.* , 2(2).
- Putra, W. (2019). *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan dan Hajiali. (2022). *Analisis Potensi Wilayah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ristika E. D. dkk. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(2): 129-136.
- Simanjuntak. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Univesitas Indonesia.
- Smith, M. P. (2003). *Economic Development, Eight Edition*. England: Pearson Education Limited.

- Sriyana, J. (2014). *Metode regresi data panel dilengkapi analisis kinerja bank syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta .
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi Teori Pengantar (Edisi ketiga)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan; Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Todaro M. P dan Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Sembilan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- UNDP. (1990). *Humant Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development*. Oxford University Press.
- UNDP. (2010). *The Real Wealth of Nations. Human Development Report 2010*.
- Wardiah, J. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 4*, 44-54.
- Wongdesmiwati. (2009, Desember 7). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*. Retrieved from wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-danpengentasan-

LAMPIRAN

Lampiran I Data Variabel Dependen dan Variabel Independen

DAERAH	ID	TAHUN	IPM	UM	TPT	JPM
Kuantan Singingi	1	2011	65,72	1.270.000	6,23	31.070
Kuantan Singingi	1	2012	66,31	1.223.000	1,9	31.260
Kuantan Singingi	1	2013	66,65	1.470.800	3,92	34.710
Kuantan Singingi	1	2014	67,47	1.770.000	6,13	33.520
Kuantan Singingi	1	2015	68,32	1.980.000	2,6	34.100
Kuantan Singingi	1	2016	68,66	2.207.700	4,5	31.220
Kuantan Singingi	1	2017	69,53	2.389.835	6,5	31.950
Kuantan Singingi	1	2018	69,96	2.597.989	5,79	32.100
Kuantan Singingi	1	2019	70,78	2.806.608	4,82	31.220
Kuantan Singingi	1	2020	70,31	3.045.450	5,21	29.340
Kuantan Singingi	1	2021	70,6	3.091.133	2,06	28.900
Indragiri Hulu	2	2011	65,93	1.130.000	7,73	27.510
Indragiri Hulu	2	2012	66,5	1.389.200	4,7	27.680
Indragiri Hulu	2	2013	66,68	1.548.888	3,82	29.600
Indragiri Hulu	2	2014	67,11	1.742.499	3,97	29.400
Indragiri Hulu	2	2015	68	1.950.000	4,82	31.630
Indragiri Hulu	2	2016	68,67	2.174.473	4,1	29.730
Indragiri Hulu	2	2017	68,97	2.440.845	4,73	26.420
Indragiri Hulu	2	2018	69,66	2.751.076	4,53	27.220
Indragiri Hulu	2	2019	70,05	2.820.000	4,79	26.660
Indragiri Hulu	2	2020	69,83	2.985.193	4,91	26.660
Indragiri Hulu	2	2021	70,01	3.082.808	3,32	27.350
Indragiri Hilir	3	2011	62,82	1.130.000	7,78	52.820
Indragiri Hilir	3	2012	63,04	1.250.000	5,4	53.010
Indragiri Hilir	3	2013	63,44	1.475.000	2,98	54.180
Indragiri Hilir	3	2014	63,8	1.742.500	4,27	52.390
Indragiri Hilir	3	2015	64,8	1.940.000	7,16	56.850
Indragiri Hilir	3	2016	65,35	2.163.658	6,01	56.820
Indragiri Hilir	3	2017	66,17	2.342.160	4,08	55.400
Indragiri Hilir	3	2018	66,51	2.546.162	3,96	51.420
Indragiri Hilir	3	2019	66,84	2.750.618	4,55	48.290
Indragiri Hilir	3	2020	66,54	2.984.696	4,35	44.290
Indragiri Hilir	3	2021	66,63	2.984.696	2,66	44.610
Pelalawan	4	2011	66,58	1.128.000	3,63	37.590
Pelalawan	4	2012	67,25	1.250.000	3,6	38.280
Pelalawan	4	2013	68,29	1.445.000	2,97	43.550
Pelalawan	4	2014	68,67	1.710.000	3,42	42.670

Pelalawan	4	2015	69,82	1.925.000	7,61	47.530
Pelalawan	4	2016	70,21	2.176.480	4,34	45.350
Pelalawan	4	2017	70,59	2.356.040	3,55	44.400
Pelalawan	4	2018	71,44	2.561.250	5,12	44.290
Pelalawan	4	2019	71,85	2.766.919	4,67	45.980
Pelalawan	4	2020	71,56	2.888.560	5,99	45.880
Pelalawan	4	2021	72,08	2.938.560	2,34	49.300
Siak	5	2011	70,2	1.186.000	8,38	20.830
Siak	5	2012	70,45	1.310.800	5,9	21.040
Siak	5	2013	70,84	1.600.000	5,38	23.210
Siak	5	2014	71,45	1.850.000	3,56	22.540
Siak	5	2015	72,17	1.982.000	10,02	24.810
Siak	5	2016	72,7	2.209.930	7,42	24.860
Siak	5	2017	73,18	2.392.249	5,6	26.830
Siak	5	2018	73,73	2.600.614	4,06	25.810
Siak	5	2019	74,07	2.809.443	4,13	24.490
Siak	5	2020	73,68	3.048.527	5,8	25.380
Siak	5	2021	73,98	3.081.146	4,34	25.770
Kampar	6	2011	69,64	1.200.000	16,98	61.200
Kampar	6	2012	70,08	1.310.800	8,6	61.750
Kampar	6	2013	70,46	1.740.000	6,2	68.580
Kampar	6	2014	70,72	1.740.000	6,1	67.610
Kampar	6	2015	71,28	1.918.000	8,07	72.220
Kampar	6	2016	71,39	2.138.570	6,59	67.680
Kampar	6	2017	72,19	2.315.002	5,93	66.330
Kampar	6	2018	72,5	2.516.638	5,19	69.320
Kampar	6	2019	73,15	2.718.724	5,65	66.810
Kampar	6	2020	72,83	2.950.088	6,15	65.300
Kampar	6	2021	73,02	3.023.840	4,27	68.740
Rokan Hulu	7	2011	64,2	1.150.000	10,36	52.820
Rokan Hulu	7	2012	64,99	1.265.000	5,56	53.550
Rokan Hulu	7	2013	66,07	1.450.000	5,04	59.850
Rokan Hulu	7	2014	67,02	1.750.000	7,9	58.290
Rokan Hulu	7	2015	67,29	1.925.000	7,82	64.740
Rokan Hulu	7	2016	67,86	2.146.375	7,02	67.420
Rokan Hulu	7	2017	68,67	2.323.451	6,17	69.240
Rokan Hulu	7	2018	69,36	2.525.823	5,23	72.280
Rokan Hulu	7	2019	69,93	2.728.647	4,51	72.210
Rokan Hulu	7	2020	69,38	2.960.855	4,42	73.350
Rokan Hulu	7	2021	69,67	2.960.855	2,25	74.730
Bengkalis	8	2011	69,72	1.125.000	10,78	34.960
Bengkalis	8	2012	70,26	1.270.000	4,4	35.250
Bengkalis	8	2013	70,6	1.610.000	7,02	40.110

Bengkalis	8	2014	70,84	1.800.000	7,3	38.820
Bengkalis	8	2015	71,29	2.225.000	10,08	40.000
Bengkalis	8	2016	71,98	2.480.875	9,44	37.490
Bengkalis	8	2017	72,27	2.685.547	8,62	38.190
Bengkalis	8	2018	72,94	2.919.458	9,76	35.110
Bengkalis	8	2019	73,44	3.005.582	9,28	35.830
Bengkalis	8	2020	73,46	3.261.357	9,31	36.960
Bengkalis	8	2021	73,58	3.342.891	6,63	37.660
Rokan Hilir	9	2011	64,76	1.350.000	12,45	43.770
Rokan Hilir	9	2012	65,09	1.427.500	8,19	44.020
Rokan Hilir	9	2013	65,46	1.520.000	6,04	47.470
Rokan Hilir	9	2014	66,22	1.720.000	6,25	46.070
Rokan Hilir	9	2015	66,81	1.910.000	8,62	49.130
Rokan Hilir	9	2016	67,52	2.129.650	5,22	52.400
Rokan Hilir	9	2017	67,84	2.305.346	4,59	53.190
Rokan Hilir	9	2018	68,73	2.506.141	5,82	48.920
Rokan Hilir	9	2019	69,4	2.707.384	4,79	49.800
Rokan Hilir	9	2020	69,15	2.937.783	4,8	48.850
Rokan Hilir	9	2021	69,34	2.996.539	3,25	51.970
Kep Meranti	10	2011	60,38	1.395.000	8,59	63.580
Kep Meranti	10	2012	61,49	1.420.500	8,63	63.850
Kep Meranti	10	2013	62,53	1.510.000	6,99	64.020
Kep Meranti	10	2014	62,91	1.745.000	11,76	61.070
Kep Meranti	10	2015	63,25	1.940.000	9,37	61.640
Kep Meranti	10	2016	63,9	2.163.100	6,39	56.180
Kep Meranti	10	2017	64,7	2.341.556	4,54	53.050
Kep Meranti	10	2018	65,23	2.545.505	6,47	51.170
Kep Meranti	10	2019	65,93	2.749.909	5,93	49.890
Kep Meranti	10	2020	65,5	2.983.926	7,94	47.100
Kep Meranti	10	2021	65,7	2.985.000	4,43	48.500
Pekanbaru	11	2011	77,71	1.135.000	11,12	32.340
Pekanbaru	11	2012	77,94	1.450.000	8,1	32.660
Pekanbaru	11	2013	78,16	1.450.000	6,66	32.460
Pekanbaru	11	2014	78,42	1.775.000	9,2	32.290
Pekanbaru	11	2015	79,32	1.925.000	7,46	33.760
Pekanbaru	11	2016	79,69	2.146.375	8,02	32.490
Pekanbaru	11	2017	80,01	2.352.577	8,91	33.090
Pekanbaru	11	2018	80,66	2.557.486	8,11	31.620
Pekanbaru	11	2019	81,35	2.762.852	7,74	28.600
Pekanbaru	11	2020	81,32	2.997.971	8,56	30.400
Pekanbaru	11	2021	81,58	2.997.971	8,29	32.730
Dumai	12	2011	70,43	1.142.000	10,13	13.970
Dumai	12	2012	71,07	1.287.000	13,73	14.110

Dumai	12	2013	71,59	1.490.000	9,6	13.720
Dumai	12	2014	71,86	1.995.520	9,14	13.620
Dumai	12	2015	72,2	2.200.000	11,23	14.970
Dumai	12	2016	72,96	2.453.000	10,22	13.760
Dumai	12	2017	73,46	2.655.373	8,94	13.530
Dumai	12	2018	74,06	2.886.655	5,87	11.190
Dumai	12	2019	74,64	3.118.453	6,3	10.950
Dumai	12	2020	74,4	3.383.834	8,19	9.880
Dumai	12	2021	74,75	3.383.834	6,29	10.570

Lampiran II
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	731.699649	(11,117)	0.0000
Cross-section Chi-square	560.409079	11	0.0000

Lampiran III

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	13.313765	3	0.0040	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.) Prob.	
Upah Minimum Jumlah Penduduk	0.000002	0.000002	0.000000	0.0191
Miskin	0.000026	0.000021	0.000000	0.0181
Pengangguran	-0.006886	-0.005786	0.000001	0.1881

Lampiran IV
Hasil Uji Multikolinearitas

	Upah Minimum	Jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran
Upah Minimum	1.000000	-0.063780	-0.267254
Jumlah Penduduk Miskin	-0.063780	1.000000	-0.111825
Tingkat Pengangguran	-0.267254	-0.111825	1.000000

Lampiran V
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 11/08/22 Time: 23:43
Sample: 2011 2021
Periods included: 11
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.195298	1.077477	2.965536	0.0037
Upah Minimum	1.35E-08	1.40E-07	0.096728	0.9231
Jumlah Penduduk Miskin	-1.50E-05	2.24E-05	-0.672514	0.5026
Pengangguran	0.005479	0.045868	0.119457	0.9051

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.839788	Mean dependent var	2.633910
Adjusted R-squared	0.820617	S.D. dependent var	2.228013
S.E. of regression	0.943644	Akaike info criterion	2.828510
Sum squared resid	104.1844	Schwarz criterion	3.156101
Log likelihood	-171.6816	Hannan-Quinn criter.	2.961628
F-statistic	43.80578	Durbin-Watson stat	1.521553
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran VI
Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	148.3725	Prob. F(2,126)	1.8647
Obs*R-squared	92.65713	Prob. Chi-Square(2)	1.8472

Lampiran VII
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Y	X1	X2	X3
6990.871	2179641.	6.421288	41609.62
6988.000	2188240.	6.025000	39410.00
8158.000	3383834.	16.98000	74730.00
6038.000	1125000.	1.900000	9880.000
432.2748	652823.6	2.544739	16563.20
0.558463	-0.040837	0.883895	0.127115
3.404302	1.749544	4.386175	2.175380
7.760401	8.636715	27.75611	4.095473
0.020647	0.013322	0.000001	0.129027
922795.0	2.88E+08	847.6100	5492470.
24478861	5.58E+13	848.3163	3.59E+10
132	132	132	132

Lampiran VIII
Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 11/29/22 Time: 19:53
Sample: 2011 2021
Periods included: 11
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6385.366	50.00394	127.6973	0.0000
Upah Minimum Jumlah Penduduk Miskin	0.000231	6.48E-06	35.63149	0.0000
Pengangguran	-0.002565	0.001038	-2.470843	0.0149
	-0.688618	2.128648	-0.323500	0.7469

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990834	Mean dependent var	6990.871
Adjusted R-squared	0.989737	S.D. dependent var	432.2748
S.E. of regression	43.79297	Akaike info criterion	10.50347
Sum squared resid	224385.4	Schwarz criterion	10.83106
Log likelihood	-678.2289	Hannan-Quinn criter.	10.63659
F-statistic	903.3479	Durbin-Watson stat	0.898239
Prob(F-statistic)	0.000000		